



JURNAL SAJARATUN

KONTEKSTUALISASI GAGASAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB DALAM PERSATUAN UMAT ISLAM

Aditya Setiawan¹, Jamilah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
muhibadit@gmail.com

Abstrak

Abstrak

Khalifah Ali ra. memimpin dalam situasi kaum muslimin yang genting dan mencekam pasca terbunuhnya Khalifah Utsman ra., delapan hari tanpa kekuasaan dan akhirnya dipilihlah Ali ra. sebagai Khalifah keempat. Menyikapi hal ini Ali ra. melakukan langkah-langkah persatuan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Tujuan Penelitian ini menganalisis gagasan-gagasan Ali ra. dalam mengupayakan persatuan di umat Islam seperti khalifah pendahulunya yaitu Abu Bakar ra. dan Umar ra. serta mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan berijtihad. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi peristiwa dengan melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi sebagai tahap terakhir dari kegiatan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Khalifah Ali ra. adalah sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan perdamaian yang hampir saja mencapai harapan yaitu tercapainya persatuan dan persaudaraan umat Islam, namun semua sirna setelah Khalifah Ali ra. menyatakan bersedia menerima Tahkim dalam Perang Shiffin.

Abstract

Caliph Ali (RA) led the Muslim community in a tense and critical situation following the assassination of Caliph Uthman (RA). After eight days without leadership, Ali (RA) was chosen as the fourth Caliph. In response to this crisis, Ali (RA) took cautious and deliberate steps to promote unity, with careful consideration and judgment. The purpose of this study is to analyze Ali's (RA) ideas in striving for the unity of the Muslim ummah, following the example of his predecessors, Caliph Abu Bakr (RA) and Caliph Umar (RA), while prioritizing the Qur'an and Hadith as the foundation for ijtihad. This study employs the historical method to reconstruct events through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography as the final step of research. The findings reveal that Caliph Ali's (RA) efforts were consistent with Islamic teachings that emphasize peace, and his leadership nearly fulfilled the aspiration of achieving unity and brotherhood among Muslims. However, this hope diminished when Caliph Ali (RA) agreed to accept arbitration (Tahkim) during the Battle of Siffin.

© 2026 Publikasi Pendidikan Sejarah Uniflor

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam mengalami ketegangan politik

yang serius sehingga tidak terjadi ekspansi wilayah kekuasaan. Gejala kekacauan ini mulai tampak setelah wafatnya Utsman bin Affan akibat pembunuhan, yang mengakibatkan kondisi umat

Article Info

Naskah diterima: 20 Mei 2026,

Naskah direvisi: 3 Juni 2026,

Naskah disetujui: 2 Juni 2026

Keywords

Kontekstualisasi,
Gagasan,
Ali bin Abi Thalib,
Persatuan

Islam menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut dipicu oleh munculnya perebutan kekuasaan dalam upaya menentukan pengganti Utsman sebagai khalifah. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, perhatian utama khalifah tersita untuk meredam berbagai pemberontakan internal yang muncul dari kalangan umat Islam sendiri, sehingga energi politik dan militernya banyak terserap untuk menjaga stabilitas pemerintahan (Al-Husaini, 1985, hlm. 337–338).

Dalam konteks tersebut, Ali mengambil langkah strategis dengan memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, sebab kota ini memiliki basis pendukung yang kuat terhadap kepemimpinannya, meskipun ia tidak menetap secara permanen di sana dan lebih banyak datang untuk mengonsolidasikan kekuasaan serta mengatur jalannya pemerintahan. Langkah ini ditempuh sebelum Ali berhadapan dengan gerakan oposisi yang digerakkan oleh tiga tokoh utama, yaitu Aisyah, Thalhah, dan Zubair, serta menghadapi sikap Mu'awiyah yang menolak menyatakan baiat kepada Ali sebagai khalifah. Keputusan politik tersebut mencerminkan upaya Ali untuk memperkuat legitimasi dan posisi strategisnya di tengah dinamika perebutan otoritas pasca terbunuhnya Utsman bin Affan (Shaban, 1984, hlm. 34).

Kondisi kenegaraan dan kehidupan sosial yang diwariskan oleh Khalifah Utsman bin Affan r.a. berada dalam situasi yang kurang menguntungkan bagi Ali r.a. ketika ia menerima amanah kekhalifahan. Sejak sebelum baiat, Ali r.a. telah menyadari bahwa ia akan berhadapan dengan berbagai tantangan besar dan kompleks. Beragam persoalan sosial, politik, dan ekonomi kemudian muncul secara simultan, sehingga menuntut penanganan yang cermat dan bertahap. Langkah awal yang ditempuh adalah menata ulang keadaan yang kacau dengan memulihkan ketertiban, terutama di ibu kota, Madinah, sebagai pusat pemerintahan. Dalam proses ini, ribuan pemberontak yang sebelumnya bergerak dan tersebar di Madinah secara bertahap dapat didekati, ditenangkan, dan dialihkan kembali ke kehidupan masyarakat yang normal. Bagi Ali r.a., opsi untuk menjatuhkan tindakan keras terhadap ribuan pemberontak yang terlibat dalam peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman r.a. hampir tidak mungkin ditempuh. Menindak mereka dengan kekuatan senjata berpotensi besar memicu konflik

horizontal yang lebih luas dan menyulut perang saudara di tengah komunitas Muslim. Pertimbangan inilah yang membuat Ali r.a. lebih mengedepankan pendekatan pemulihan stabilitas ketimbang balasan represif (al-Afghani, 2001, hlm. 67).

Menurut Ali r.a., tidak terdapat alternatif pilihan yang lebih tepat dalam situasi tersebut. Ali memandang bahwa berkonfrontasi dengan sesama kaum Muslim yang menuntut tegaknya kebenaran dan keadilan bukanlah opsi yang bijak, sehingga ia lebih memilih berhadapan langsung dengan para elite Bani Umayyah, sekalipun risiko politik dan militernya sangat besar. Sikap Ali r.a. yang tidak mengambil tindakan represif terhadap kelompok Muslim yang memberontak kepada Khalifah Utsman r.a. kemudian dijadikan alasan dan legitimasi oleh para rival politiknya untuk menggalang kekuatan oposisi dan perlawanan terhadap kepemimpinannya. Kemungkinan munculnya manuver politik semacam ini sejatinya telah diperhitungkan sebelumnya oleh Ali r.a., namun ia tetap mengedepankan pertimbangan etis dan kemaslahatan umat dalam menentukan langkah (H. M. H. al-Hamid al-Husaini, 1986, hlm. 90).

Melalui beberapa peristiwa yang sangat bersejarah ini penulis akan mengkaji bagaimana sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam pada masa-masa genting dan mencekam dalam menghadapi situasi politik yang labil sesuai dengan ijtihad Khalifah Ali.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, konflik politik pada masa kekhalifahannya, serta dampaknya terhadap perkembangan sektarianisme Islam, masih terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*).

Pertama, sebagian besar penelitian menempatkan Ali bin Abi Thalib sebagai objek kajian sejarah dan politik, bukan sebagai sumber gagasan normatif yang dapat dikontekstualisasikan dalam upaya membangun persatuan umat Islam masa kini. Kedua, penelitian yang menghubungkan nilai-nilai kepemimpinan Ali dengan problem kontemporer seperti polarisasi sosial, konflik mazhab, intoleransi, dan disintegrasi umat masih relatif terbatas. Ketiga, belum banyak kajian yang secara khusus mengonstruksi model konseptual persatuan umat Islam berdasarkan gagasan Ali bin Abi Thalib dengan

SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
e-ISSN: 2809-8293 | <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i2>
menggunakan pendekatan kontekstual dan relevansinya terhadap masyarakat Muslim modern.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis gagasan Ali bin Abi Thalib mengenai persatuan umat Islam serta mengontekstualisasikannya dalam dinamika sosial-keagamaan kontemporer. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis gagasan-gagasan Ali ra. dalam mengupayakan persatuan di umat Islam seperti khalifah pendahulunya yaitu Abu Bakar ra. dan Umar ra. serta mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan berijtihad. Urgensi dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan studi pemikiran politik Islam sekaligus kontribusi praktis berupa tawaran nilai-nilai persatuan, moderasi, dan rekonsiliasi yang bersumber dari teladan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan sosial-historis. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai instrumen analitis untuk mengurai dan menelaah berbagai dimensi sosial yang melingkupi objek kajian, sedangkan pendekatan historis diarahkan untuk merekonstruksi fakta-fakta mengenai apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa berlangsung secara runtut dan komprehensif, disertai penjelasan serta interpretasi kritis atas realitas yang ditemukan (Abdurrahman, 1999, hlm. 1–3). Penulis berusaha memaparkan gagasan-gagasan Khalifah Ali ra. dalam memperjuangkan persatuan umat Islam dengan menelusuri peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kepemimpinannya sebagai suatu fakta sejarah dan menjadikannya objek untuk dianalisis.

Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian dan analisis terhadap peristiwa-peristiwa di masa lampau, sehingga metode yang dipilih adalah metode historis, yakni prosedur pengujian dan pengkajian secara kritis terhadap rekaman serta berbagai peninggalan sejarah, kemudian diurai secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan (Hadi, 1990, hlm. 3). Sejarah dalam konteks ini dipahami sebagai rekonstruksi masa lalu yang disusun berdasarkan kaidah dan prosedur penelitian ilmiah, sehingga penelitian

dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut (Kuntowijoyo, 1995, hlm. 12):

Pertama, *heuristik* (pengumpulan bahan). Penelitian ini bersifat kepustakaan, sehingga pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran berbagai dokumen tertulis, terutama buku-buku dan literatur lain yang relevan dengan tema perjuangan Khalifah Ali r.a. dalam menyatukan umat Islam.

Kedua, *verifikasi* (kritik sumber). Setelah bahan terkumpul, dilakukan seleksi dan pengujian keabsahan sumber untuk menilai otentisitas dan kredibilitasnya, baik melalui kajian aspek lahiriah maupun isi, dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah secara mendalam sumber-sumber sejarah yang terkait.

Ketiga, *interpretasi* (penafsiran). Pada tahap ini, peneliti menganalisis bahan yang ada dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lain, lalu merumuskan fakta dan informasi yang relevan guna membangun pemahaman yang utuh serta runtutan kronologis peristiwa, sehingga terbentuk narasi sejarah yang koheren dan tidak terputus.

Keempat, *historiografi* (penulisan), yaitu tahapan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang memaparkan secara jelas proses penelitian sejak awal hingga akhir, sekaligus menyajikan hasil rekonstruksi sejarah berdasarkan bahan dan analisis yang telah dilakukan (Abdurrahman, 1999, hlm. 67). Tahap ini merupakan fase akhir dalam proses penulisan, di mana seluruh temuan yang telah melalui berbagai prosedur seleksi dan pengolahan dirumuskan menjadi kesimpulan akhir yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib r.a. berasal dari keluarga terhormat dan memiliki garis nasab yang mulia. Rangkaian silsilahnya bersambung dari Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushai hingga mencapai Adnan, yang menegaskan kedudukannya sebagai bagian dari keluarga besar Quraisy yang terpandang (Ibnu Katsir, 2014, hlm. 541). Pada jalur ini, nasab Ali r.a. bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek mereka yang sama, yakni Abdul Muthalib bin Hasyim, yang memiliki putra bernama Abu Thalib

ayah Ali dan Abdullah ayah Rasulullah Saw (Ash-Shallabi, 2012, hlm. 13).

Ali r.a. dilahirkan di Mekkah pada hari Jumat, 13 Rajab sekitar tahun 600 M, yang diperkirakan berjarak kurang lebih tiga puluh tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. Momentum kelahirannya dalam lingkungan keluarga Quraisy yang terhormat serta kedekatannya secara nasab dan sosial dengan Rasulullah Saw menjadi landasan penting bagi perjalanan hidup dan peran besar Ali r.a. dalam sejarah Islam (Audah, 2013, hlm. 27).

Sejak lahir, Ali bin Abi Thalib r.a. diberi nama Haidarah (Singa), sebuah nama yang dipilih ibunya sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya yang bernama As'ad bin Hasyim (Ash-Shallabi, 2012, hlm. 13). Di kalangan para sahabat, ia juga dikenal dengan panggilan Abul Hasan, merujuk kepada putra sulungnya dari pernikahannya dengan Fatimah, yaitu al-Hasan. Selain itu, Rasulullah Saw memberikan kepadanya julukan khusus, yakni Abu Turab (al-H. al-Husaini, 1989, hlm. 27).

Secara fisik, Ali r.a. digambarkan bertubuh agak berisi dengan bahu yang bidang, mata yang besar, dan wajah yang tidak terlalu putih, dihiasi janggut, cambang, serta bulu badan yang lebat. Kekuatan fisiknya tampak pada perpaduan tangan dan kaki yang kokoh, dengan postur sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek serta gaya berjalan yang condong ke depan, serupa dengan cara berjalan Rasulullah Saw (Audah, 2013, hlm. 31).

2. Bai'at Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada awalnya Ali r.a. menolak dibai'at menjadi Khalifah. Dengan lantang ia menyatakan : "Aku lebih baik menjadi wazir yang membantu daripada menjadi seorang Amir yang berkuasa. Siapa pun yang kalian bai'at sebagai Khalifah, akan kuterima dengan rela. Ingatlah, kita akan menghadapi banyak hal yang menggoncangkan hati dan pikiran. Jawaban Ali r.a. yang seperti itu tak dapat diterima sebagai alasan oleh banyak kaum muslimin yang waktu itu datang berkerumun di rumahnya. Mereka tetap mendesak atau setengah memaksa, supaya Ali r.a. bersedia dibai'at oleh mereka sebagai Khalifah. Dengan mantap mereka menegaskan pendirian: "Tidak ada orang lain yang dapat menegakkan pemerintahan dan hukum-hukum Islam selain anda. Kami khawatir terhadap ummat Islam, jika kekhalifahan jatuh ketangan orang lain..." (Al-Husaini, 1985, hlm. 83).

Beberapa saat lamanya terjadi saling-tolak dan saling tukar pendapat antara Ali r.a. dengan mereka. Para sahabat Nabi Muhammad Saw. dan para pemuka kaum Muhajirin dan Anshar mengemukakan alasannya masing-masing tentang apa sebabnya mereka mempercayakan kepemimpinan tertinggi kepada Ali r.a. Betapapun kuat dan benarnya alasan yang mereka ajukan Ali r.a. tetap menyadari, jika ia menerima pembai'atan mereka pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan gawat. Baru setelah Ali r.a. yakin benar, bahwa kaum muslimin memang sangat menginginkan pimpinannya, dengan perasaan berat ia menyatakan kesediaannya untuk menerima pembai'atan mereka. Satu-satunya alasan yang mendorong Ali r.a. bersedia dibai'at, ialah demi kejayaan Islam, keutuhan persatuan dan kepentingan kaum muslimin. Rasa tanggung jawabnya yang besar atas terpeliharanya nilai-nilai peninggalan Rasul Allah Saw, membuatnya siap menerima tanggung jawab berat di atas pundaknya. Sungguhpun demikian, ia tidak pernah lengah, bahwa situasi yang ditinggalkan oleh Khalifah Utsman r.a. benar-benar merupakan tantangan besar yang harus ditanggulangi. Keputusan Ali r.a. untuk bersedia dibai'at sebagai Amirul Mukminin disambut dengan perasaan lega dan gembira oleh sebagian besar kaum muslimin (Al-Husaini, 1985, hlm. 84).

Pembaiatan Ali bin Abi Thalib r.a. sebagai khalifah dilakukan oleh mayoritas sahabat, baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar, pada akhir Dzulhijjah tahun 35 H. Dalam proses tersebut muncul perbedaan pandangan terkait baiat Thalhah dan Zubair, karena keduanya dinilai memberikan sumpah setia dalam kondisi tertekan, atau sedikitnya dengan rasa keberatan batin. Istilah "dipaksa" tentu berbeda dengan "terpaksa", meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa keduanya benar-benar berada dalam tekanan untuk membaiat, sebab mereka memandang bahwa penyelesaian kasus pembunuhan Utsman dan penegakan sanksi terhadap para pelakunya lebih mendesak daripada segera melakukan baiat kepada khalifah baru (Muhammad, 2011, hlm. 673).

Keduanya kemudian mensyaratkan agar Ali menegakkan keadilan terhadap pembunuh Utsman sebagai bagian dari baiat tersebut. Pada akhirnya, Thalhah dan Zubair menarik kembali sumpah setia mereka; sebagian riwayat menyebut bahwa penarikan

baiat itu juga dipengaruhi kekecewaan karena keinginan mereka untuk menduduki jabatan gubernur di Kufah dan Basrah tidak terpenuhi (Fu'ad, 2012, hlm. 98).

3. Upaya Stabilitas Politik dan Hukum

Sejumlah sejarawan, baik dari kalangan klasik maupun modern, sepakat bahwa sikap Muawiyah menentang Ali r.a. bukan didorong oleh ambisi merebut jabatan khalifah, melainkan oleh keinginannya menuntut pelaksanaan qisas terhadap para pelaku pembunuhan Utsman r.a. Muawiyah meyakini dirinya berada di pihak yang benar karena memandang dirinya sebagai wali dan penuntut darah Utsman, namun pada titik inilah letak kekeliruannya dalam menilai situasi. Ali r.a. sama sekali tidak berniat menunda penegakan hukum bagi para pembunuh Utsman, tetapi ia memprioritaskan penanganan problem yang lebih mendesak, yakni keberadaan kelompok pemberontak yang masih menguasai Madinah. Dalam konteks itulah Ali berkata kepada Thalib dan Zubair bahwa mustahil menindak pihak-pihak yang justru sedang memegang kendali atas situasi, sementara otoritas pemerintah belum sepenuhnya kokoh.

Ali menilai bahwa kondisi tersebut telah bergeser menjadi persoalan yang bercorak jahiliah, sehingga langkah yang diperlukan adalah menenangkan keadaan terlebih dahulu, menata kembali hati dan emosi masyarakat, dan memastikan hak-hak dasar dapat dipenuhi sebelum melangkah pada tahap penegakan qisas. Pendekatan ini mencerminkan orientasi Ali r.a. pada stabilisasi umat dan pencegahan pertumpahan darah yang lebih luas (A. & Saleh, 2014, hlm. 228).

Setelah pengangkatan sebagai Khalifah pasca terbunuhnya Utsman, Ali bin Abi Thalib berusaha keras untuk memulihkan keamanan yang tidak stabil. Pengangkatan Ali menjadi *Khalifah* berada dalam kondisi dan situasi yang amat sulit. Stabilitas yang tidak terjamin menyebabkan Ali mengalami berbagai kesulitan yang tidak sedikit. Beratnya tugas pemerintahan yang mengharuskan Ali untuk mengambil langkah kebijakan-kebijakan demi terciptanya kondisi negara yang aman, walaupun terkadang kebijakan itu bertentangan dengan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat (Djazuli, 2003, hlm. 21).

Khalifah Ali Ra. terus melangkah mengadakan pembenahan dalam lingkungan pejabatnya. Khalifah Ali Ra. juga menerapkan pengawasan ketat terhadap pejabat pemerintah yang baru. Ternyata para pejabat baru yang diangkat oleh Khalifah Ali menimbulkan pro dan kontra dikalangan rakyat daerah. Ada yang menerima dan ada yang menolak, serta ada yang bersikap netral seperti Mesir dan Bashrah. Pengiriman para pejabat baru itu dilakukan oleh Khalifah Ali pada awal tahun 36 Hijriyah (Sholeh, 2009, hlm. 114).

Untuk menggantikan gubernur yang diangkat pada era Utsman, Ali mengangkat sepupunya yang bernama Ubaidullah bin Abbas untuk Yaman menggantikan Ya'la bin Umayyah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah yang menjabat wazir di Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. mengangkat Utsman bin Hunaif sebagai gubernur Basrah untuk menggantikan Abdullah bin Amir al-Hadrami, yang sebelumnya telah berangkat ke Makkah dengan membawa sebagian harta yang dapat disertakannya (Katsir, 2004, hlm. 451).

Sementara itu, Umarah bin Syihab ditunjuk sebagai gubernur Kufah, namun dalam perjalanannya menuju Kufah ia dihadang oleh Tulaihah bin Khuwailid yang memintanya kembali, karena masyarakat Kufah masih menghendaki Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur mereka. Sekembalinya Umarah ke Madinah, Abu Musa kemudian mengirim surat kepada Khalifah Ali untuk menegaskan baiatnya, sekaligus menyampaikan bahwa penduduk Kufah juga telah membaiat khalifah yang baru. Adapun Sahl bin Hunaif yang ditunjuk sebagai gubernur baru di Syam tidak pernah berhasil menduduki jabatannya karena ditolak oleh penduduk Syam dan dilarang memasuki wilayah tersebut. Sikap penolakan ini sejak awal telah diperkirakan oleh Khalifah Ali, mengingat Muawiyah yang berkuasa di Syam hampir dapat dipastikan tidak akan begitu saja menerima pencopotannya dari jabatan (Audah, 2013, hlm. 203).

Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. kemudian mengirim surat kepada Muawiyah agar ia membaiat dan bergabung dalam barisan pemerintahannya demi meredam gejolak yang telah terjadi di tengah umat. Namun surat tersebut tidak segera mendapatkan tanggapan; baru setelah kurang lebih tiga bulan berlalu, Muawiyah mengirimkan balasan kepada Ali

yang hanya berisi satu kalimat pendek, yaitu “*Bismillahirrahmanirrahim.*” Ketika membaca kalimat tersebut masyarakat tahu bahwasannya Muawiyah menolak bai’at kepada Khalifah Ali (Abdul Latif, 2011, hlm. 92).

Korespondensi terus dilakukan antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Khalifah Ali tetap bersikukuh untuk mencopot Muawiyah sebagai gubernur Syam, sementara Muawiyah bersikeras menuntut bela atas kematian Utsman dan menghukum para pembunuh dengan hukuman Qisas atau agar para pembunuh itu diserahkan kepada dirinya yang merupakan wali atas darah Utsman sebelum membicarakan masalah bai’at (Abdul Latif, 2011, hlm. 93).

Ali bin Abi Thalib Ra. telah membuat keputusan yang besar. Khalifah keempat ini memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Tindakan ini sangat luar biasa berani, karena tindakan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah dan ketiga Khalifah awal. Ini merupakan cara Khalifah Ali memisahkan urusan politik dan agama. Latar belakang pemindahan pusat kota pada masa Khalifah Ali adalah dengan melihat kondisi sosial politik di Madinah, sehingga Ali belajar dari masuknya para pemberontak ke wilayah Madinah yang telah mengotori kesuciannya. Secara tidak langsung Khalifah Ali telah berusaha menarik batas antara agama dan politik (Hosen, 2018, hlm. 90).

4. Pencegahan Konfrontasi dalam Perang Jamal

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. sering dipandang berada dalam kondisi yang kurang stabil karena diguncang oleh pemberontakan yang justru datang dari sebagian kaum Muslim sendiri. Gelombang perlawanan pertama muncul ketika Thalhah dan Zubair menarik kembali baiat mereka, dengan alasan bahwa Khalifah Ali dinilai tidak segera memenuhi tuntutan untuk menjatuhkan hukuman terhadap para pembunuh Khalifah Utsman r.a. Penolakan Ali r.a. terhadap desakan tersebut kemudian disampaikan kepada Aisyah r.a., kerabat dekatnya, ketika beliau dalam perjalanan pulang dari Makkah dan saat itu belum mengetahui peristiwa terbunuhnya Utsman, sementara Thalhah dan Zubair sedang menuju Basrah.

Aisyah r.a. akhirnya bergabung dengan keduanya dalam barisan oposisi terhadap Ali, baik karena alasan tidak terpenuhinya tuntutan

penegakan hukuman atas pembunuh Utsman maupun karena pengaruh ajakan dan narasi yang dibawa oleh Thalhah dan Zubair. Mu’awiyah r.a. turut berperan dalam dinamika tersebut, meski lebih banyak melalui upaya delegitimasi, dengan menggoyahkan kepercayaan umat terhadap Khalifah Ali. Ia menuduh Ali terlibat atau bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman apabila tidak mampu menemukan dan menghukum para pelaku sebenarnya (Supriyadi, 2008, hlm. 94).

Tuntutan-tuntutan ini tidak mungkin segera dipenuhi oleh Ali sedikitnya karena dua faktor utama. Pertama, dalam situasi genting yang sarat tekanan dan kekacauan, prioritas mendesak adalah memulihkan keamanan, menegakkan kembali ketertiban umum, dan mengonsolidasikan kedudukan kekhalifahan agar otoritas pemerintahan kembali efektif. Kedua, proses penghukuman terhadap para pembunuh Utsman bukan perkara sederhana, sebab peristiwa tersebut melibatkan banyak pelaku dari berbagai wilayah Mesir, Irak, dan kabilah-kabilah Arab lain yang membuat identifikasi dan penindakan hukum terhadap mereka memerlukan waktu, kehati-hatian, dan kekuatan politik yang telah benar-benar mapan (Supriyadi, 2008, hlm. 97).

Karena sangat sulit untuk menyetujui permintaan untuk menghukum pembunuh Khalifah Utsman, Khalifah Ali pada dasarnya berusaha mencegah pertumpahan darah dengan menyarankan kompromi. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya terjadilah pertempuran antara Thalhah, Zubair, dan pasukan Aishah serta Khalifah Ali. Perang ini terjadi pada tahun 36 H menurut catatan sejarah. Dalam pertempuran ini, Thalhah dan Zubair tewas ketika berupaya meninggalkan medan perang, sedangkan Aisyah r.a. kemudian dipulangkan ke Madinah. Konflik tersebut dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta, dinamai demikian karena Aisyah, istri Nabi Saw., berada di atas seekor unta pada saat pertempuran berlangsung. Dalam peperangan ini, diperkirakan sekitar 20.000 kaum Muslimin gugur, menjadikannya salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam.

Perang Jamal menempati posisi penting dalam catatan sejarah, karena untuk pertama kalinya seorang khalifah memimpin langsung pasukan di medan perang dalam konflik bersenjata melawan sesama Muslim. Setelah berhasil meredam gerakan

yang dipimpin Thalhah dan Zubair beserta kelompoknya, Ali r.a. memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Sejak saat itu, Madinah tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota politik kekhalifahan, dan tidak ada lagi khalifah yang menjadikannya sebagai pusat pemerintahan resmi. Pada fase ini, Ali r.a. memegang otoritas atas hampir seluruh wilayah kekuasaan Islam, dengan pengecualian wilayah Syam yang masih berada di bawah kendali Mu'awiyah (Amin, 2009, hlm. 110–111).

5. Perdamaian Semu dalam Perang Shiffin

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib r.a. tidak memperoleh pengakuan di wilayah Suriah, karena di sana muncul kekuatan oposisi yang dipimpin Muawiyah dari pusat pemerintahannya di Damaskus. Utsman bin Affan r.a. adalah kerabat dekat Muawiyah, sehingga sebagai figur utama dari keluarga Umayyah, ia merasa berkewajiban menuntut balasan atas kematian Utsman dan membela kehormatan keluarganya. Muawiyah mendapat dukungan kuat dari kabilah-kabilah Quraisy Makkah yang berpengaruh secara ekonomi, serta dari masyarakat Arab di Syam yang mengapresiasi gaya kepemimpinannya yang tegas dan teratur.

Ali r.a. kemungkinan memahami posisi dan sensitivitas Muawiyah, sehingga pada tahap awal tidak serta-merta mengambil tindakan keras terhadapnya. Dalam pandangannya, sangat menyedihkan dan tidak pantas apabila sesama kerabat dan sahabat Nabi terjerumus dalam konflik bersenjata. Bagi Ali r.a., hal itu bertentangan dengan misi profetik Nabi Muhammad SAW yang bertujuan membangun persatuan, memadukan barisan kaum Muslimin, dan menjadikan kehidupan umat sebagai cerminan dari prinsip keesaan Allah. Pendekatan inilah yang membuat Ali lebih berhati-hati dalam menyikapi ketegangan politik dengan Muawiyah pada fase awal perselisihan mereka (Armstrong, 2002, hlm. 49).

Sebelum meletusnya Perang Shiffin, Ali bin Abi Thalib r.a. berulang kali mengirim utusan kepada Muawiyah untuk mengupayakan penyelesaian damai, namun seluruh usaha tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Ali menyadari bahwa bila keadaan dibiarkan berlarut, posisi Muawiyah berpotensi

menjadi ancaman serius bagi keutuhan kekuasaan Islam, terlebih ketika seluruh wilayah lain telah berada di bawah satu otoritas, kecuali daerah yang dipimpin Muawiyah. Sebagai figur yang menjunjung tinggi perdamaian, Ali r.a. berkeinginan kuat menyelesaikan konflik tersebut melalui jalur diplomasi, meskipun harus menanggung konsekuensi politik yang tidak ringan. Ia kembali mengirim surat kepada Muawiyah, mengajaknya untuk berbaiat demi kemaslahatan Islam dan persatuan umat. Namun, Muawiyah tetap bersikukuh pada pendiriannya, dengan alasan tidak akan mengakui kepemimpinan Ali sebelum tuntutan pembalasan atas terbunuhnya Utsman r.a. dipenuhi (Audah, 2013, hlm. 247).

Melihat situasi yang kian memanas, Ali bin Abi Thalib r.a. memerintahkan pasukannya untuk bersiap, hingga sekitar 50.000 orang berkumpul di sekelilingnya dan siap bergerak menuju Syam. Di pihak Muawiyah, kekuatan yang lebih besar telah disusun dan ditempatkan pada posisi strategis di wilayah seberang Shiffin, sedangkan pasukan Ali bermarkas di kawasan Shiffin itu sendiri. Meski berhadapan dengan situasi militer yang tegang, tujuan utama Ali r.a. bukanlah menumpahkan darah sesama Muslim.

Ia masih mengupayakan jalur damai dengan mengirim tiga orang utusan untuk merundingkan perdamaian dengan Muawiyah, namun jawaban yang diterima tetap sama: Muawiyah bersikukuh pada tuntutan agar terlebih dahulu dilakukan penuntutan balas atas pembunuhan Utsman r.a. Menurutnya, sebagai wali Utsman, ia wajib menegakkan hak-hak kerabatnya sebelum bersedia mengakui kekhalifahan Ali r.a. (Audah, 2013, hlm. 256).

Peperangan akhirnya meletus di Shiffin pada tahun 37 H dan hampir dimenangkan oleh pasukan Ali. Pada saat genting inilah, atas usulan panglimanya, Amr bin Ash, kubu Muawiyah mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung-ujung tombak sebagai isyarat ajakan berhukum kepada Al-Qur'an dan menghentikan pertempuran. Ali r.a. memahami bahwa langkah tersebut merupakan siasat politik, tetapi karena tekanan kuat dari sebagian besar pasukannya yang tidak ingin melanjutkan peperangan, ia akhirnya menerima usulan penghentian perang dan proses tahkim itu.

Dalam keadaan pasukan Muawiyah terdesak, muncullah sosok Amr bin Ash, seorang negarawan dan ahli strategi yang sangat piawai pada masanya. Sebagai diplomat ulung, ia dikenal cakap mencari jalan keluar di tengah situasi politik dan militer yang buntu. Amr kemudian mengusulkan kepada Muawiyah agar barisan depan pasukan mengangkat mushaf Al-Qur'an yang diikat di ujung tombak. Isyarat simbolik ini dimaksudkan sebagai tanda bahwa pertempuran harus dihentikan dan persoalan diselesaikan melalui perundingan, dengan ketentuan bahwa keputusan akhir didasarkan pada hukum Al-Qur'an (Supriyadi, 2008, hlm. 98).

Mekanisme penyelesaian ini kemudian dikenal dengan istilah tahkim (arbitrase). Strategi inilah yang akhirnya dijalankan oleh kubu Muawiyah sebagai langkah keluar dari tekanan militer yang mereka hadapi. Ali bin Abi Thalib r.a. sebenarnya menyadari bahwa langkah tersebut sarat muatan taktik dan permainan politik, bukan sekadar ajakan tulus untuk berhukum kepada Al-Qur'an.

Namun, sebagian tokoh dalam pasukannya yang dikenal saleh dan ingin segera menghentikan pertumpahan darah tidak sependapat dengannya. Mereka telah lelah berperang selama berbulan-bulan, sehingga mendesak Ali untuk menerima gencatan senjata melalui jalan tahkim. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan internal di tengah pengikut Ali r.a., antara kelompok yang berpendapat perang harus diteruskan hingga kemenangan diraih dan kelompok lain yang mendukung penghentian pertempuran melalui perundingan (Audah, 2013, hlm. 262).

Perundingan damai kemudian diselenggarakan pada bulan Ramadan tahun 34 H. Masing-masing pihak menunjuk seorang wakil yang berperan sebagai hakim atau juru penengah. Kubu Muawiyah memilih Amr bin Ash, sementara kubu Ali pada awalnya mengusulkan Abdullah bin Abbas. Akan tetapi, sebagian pasukan memprotes karena memandang Ibn Abbas terlalu dekat secara kekerabatan dengan Ali. Dengan berat hati, Ali r.a. akhirnya menyetujui penunjukan Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakilnya. Kedua tokoh ini memiliki karakter yang sangat kontras: Amr bin Ash dikenal cerdik dan mahir bersiasat dalam percaturan politik, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari berkepribadian lurus, sederhana, dan amat mengutamakan perdamaian, sehingga kurang

luwes menghadapi manuver politik lawannya (Dahlan, 1997, hlm. 113).

Terdapat beragam riwayat yang mengisahkan detail peristiwa tahkim dan konsekuensinya. Salah satu yang banyak dikemukakan para sejarawan menggambarkan bahwa, setelah perundingan usai, Abu Musa al-Asy'ari meminta Amr bin Ash untuk mengumumkan hasil keputusan. Amr, yang terkenal lihai dalam strategi politik, justru menampilkan sikap merendah dan penuh penghormatan, lalu mempersilakan Abu Musa tampil lebih dahulu di hadapan khalayak. Abu Musa kemudian menyampaikan di muka umum bahwa, setelah melalui musyawarah, mereka menilai jalan terbaik untuk meredakan krisis adalah mengambil langkah demi kemaslahatan bersama: kedua pihak telah sepakat mencabut kedudukan Ali dan Muawiyah, dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan pemimpin berikutnya kepada majelis syura kaum Muslimin.

Seusai Abu Musa berbicara, Amr bin Ash maju dan berkata bahwa ia membenarkan pencabutan kedudukan yang diumumkan Abu Musa terhadap sahabatnya, tetapi pada saat yang sama ia justru menetapkan Muawiyah sebagai pemimpin, dengan alasan bahwa Muawiyah adalah wakil dan penuntut darah Utsman sehingga dianggap paling berhak memegang jabatan tersebut. Abu Musa memprotes tindakan Amr yang dipandang sebagai bentuk tipu daya dan pengkhianatan terhadap kesepakatan. Sementara itu, kubu Syam menyambut pernyataan Amr dengan suka cita, mengangkat dan mengelulukan Muawiyah. Langkah pertama yang diambil Muawiyah setelah itu adalah menyatakan dirinya sebagai khalifah di hadapan para pendukungnya (Audah, 2013, hlm. 263–264).

Persitiwa perundingan tahkim di atas menonjolkan kecerdikan politik Amr bin Ash sebagai diplomat dan ahli strategi perang, berhadapan dengan sosok Abu Musa al-Asy'ari yang dikenal sebagai ulama sepuh yang rendah hati dan sangat menjaga ketakwaan. Dalam catatan sejarah, mekanisme tahkim yang diproyeksikan sebagai jalan damai untuk mengakhiri konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ternyata gagal mewujudkan rekonsiliasi dan justru memperdalam perpecahan di tengah umat.

Upaya arbitrase yang semula dimaksudkan untuk mempertemukan dua kubu yang bertikai demi mengembalikan persatuan kaum Muslim berakhir

dengan hasil yang lebih buruk: ketegangan politik semakin tajam dan konstelasi konflik makin rumit. Peristiwa ini jelas lebih merugikan posisi Ali dan menguntungkan Muawiyah. Secara normatif, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah, sedangkan Muawiyah pada mulanya hanyalah seorang gubernur yang menolak tunduk pada otoritasnya. Melalui tahkim, posisi Muawiyah naik kelas menjadi semacam khalifah *de facto* meski tidak resmi, sehingga wajar jika Ali menolak keputusan tersebut sampai akhir hayatnya, sebelum kemudian syahid pada tahun 661 M.

6. Cita-Cita Yang Menjadi Fatamorgana

Perang yang berakhir dengan mekanisme tahkim (arbitrase) ternyata tidak menyelesaikan konflik, bahkan justru memunculkan kelompok ketiga yang dikenal sebagai Khawarij, yaitu mereka yang memisahkan diri dari barisan pendukung Ali bin Abi Thalib r.a. Pada penghujung masa kekhalifahan Ali, konstelasi politik umat Islam terfragmentasi ke dalam tiga kekuatan utama: kelompok Muawiyah, kelompok Syi'ah sebagai pengikut Ali, dan kelompok Khawarij. Konfigurasi ini jelas tidak berpihak pada Ali r.a. Kehadiran Khawarij melemahkan basis kekuatan militernya dari dalam, sementara di sisi lain posisi dan pengaruh Muawiyah semakin menguat, baik secara politik maupun militer (Yatim, 1994, hlm. 40).

Kelompok ini pada mulanya merupakan jamaah yang menjadi murid dan pendukung setia Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal dengan sebutan *al-qurra*, yaitu para pembaca dan penghafal *al-Qur'an*, sekaligus ahli *Qur'an* yang memiliki reputasi tinggi karena kepiawaian mereka dalam membaca, menghafal, dan mengajarkan *al-Qur'an*. Di tengah masyarakat Muslim, mereka menempati posisi terhormat, dengan ciri khas busana berupa *burnus*, semacam mantel yang menyatu dengan penutup kepala. Di antara mereka, terutama yang berasal dari kabilah Tamim, terdapat kelompok yang sangat keras menolak kesepakatan tahkim. Sebagai bentuk penolakan, ketika terjadi perdebatan antara pihak yang menyetujui dan menolak tahkim, golongan *al-qurra* memilih meninggalkan majelis dan memisahkan diri dari barisan utama (Audah, 2013, hlm. 277).

Sebanyak kurang lebih 12 ribu orang menolak proses tahkim, meskipun pada mulanya merekalah yang paling keras mendesak Ali r.a. agar menyetujuinya. Sikap penentangan mereka berkembang semakin ekstrem hingga berani menvonis Ali sebagai kafir. Ali bersama beberapa sahabat terkemuka berupaya berdialog dan membantah pandangan mereka, namun kelompok ini tetap bersikukuh dan tidak mau menarik pendapatnya. Mereka hanya mengakui kebenaran tafsir dan pemikiran mereka sendiri, bahkan menjadikan isu hukum tahkim sebagai bahan pertanyaan kepada siapa pun yang mereka jumpai. Pada tahun 38 H, setelah berbagai upaya musyawarah tidak membuahkan hasil, Ali r.a. akhirnya memerangi mereka. Dalam konfrontasi tersebut, banyak dari mereka yang tewas, sementara sisanya melarikan diri dan kemudian tercerai-berai menjadi kurang lebih dua puluh faksi kecil yang berbeda (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm. 229).

Pada tahun 39 H, Ali bin Abi Thalib r.a. dan Muawiyah r.a. mencapai kesepakatan untuk menghentikan permusuhan bersenjata, dengan salah satu poin penting bahwa Muawiyah tetap memegang kendali atas wilayah Syam tanpa intervensi langsung dari Amirul Mukminin. Kesepakatan ini menjadi semacam jeda politik sekaligus upaya meredakan eskalasi konflik yang telah lama menguras kekuatan umat. Namun, pada tahun 40 H, muncul tiga orang dari kelompok Khawarij yang bersekongkol untuk melakukan aksi kekerasan terkoordinasi dengan menjadikan Muawiyah, Ali, dan Amr bin Ash sebagai target pembunuhan secara serentak. Rencana ini mencerminkan radikalisasi sikap Khawarij yang tidak hanya menolak kedua kubu, tetapi juga memilih jalan ekstrem untuk menjatuhkan figur-figur utama dalam konflik tersebut. Rencana itu gagal membunuh Muawiyah dan Amr, tetapi berhasil menewaskan Ali. Menjelang fajar, dua orang Khawarij membuntuti Ali yang keluar rumah untuk membangunkan kaum muslimin agar menunaikan salat. Mereka lalu menyerangnya di depan pintu masjid hingga beliau gugur sebagai syahid (Ibrahim & Saleh, 2014, hlm. 230).

Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kedudukan khalifah digantikan oleh putranya, Hasan. Namun, kepemimpinan Hasan hanya berlangsung beberapa bulan. Ia dianggap lemah dalam menghadapi situasi

politik yang semakin sulit, sementara Muawiyah semakin kuat dengan dukungan yang luas. Akhirnya, Hasan memilih jalan damai dengan membuat perjanjian dengan Muawiyah. Perjanjian tersebut pada akhirnya mempersatukan kembali umat Islam di bawah satu otoritas politik, yakni kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan r.a. Dalam waktu yang sama, kesepakatan itu juga menempatkan Muawiyah sebagai penguasa dengan otoritas yang sangat kuat dalam struktur pemerintahan Islam. Tahun 41 H (661 M), ketika konsolidasi persatuan itu tercapai, kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Jamaah ('Am al-Jama'ah). Sejak momen itulah masa Khulafaur Rasyidin dinyatakan berakhir, dan sejarah politik Islam memasuki babak baru, yaitu era kekuasaan Dinasti Umayyah (Yatim, 1994, hlm. 40–41).

Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kedudukan khalifah digantikan oleh putranya, Hasan. Namun, kepemimpinan Hasan hanya berlangsung beberapa bulan. Ia dianggap lemah dalam menghadapi situasi politik yang semakin sulit, sementara Muawiyah semakin kuat dengan dukungan yang luas. Akhirnya, Hasan memilih jalan damai dengan membuat perjanjian dengan Muawiyah. Perjanjian tersebut pada akhirnya mempersatukan kembali umat Islam di bawah satu otoritas politik, yakni kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan r.a. Dalam waktu yang sama, kesepakatan itu juga menempatkan Muawiyah sebagai penguasa dengan otoritas yang sangat kuat dalam struktur pemerintahan Islam. Tahun 41 H (661 M), ketika konsolidasi persatuan itu tercapai, kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Jamaah ('Am al-Jama'ah). Sejak momen itulah masa Khulafaur Rasyidin dinyatakan berakhir, dan sejarah politik Islam memasuki babak baru, yaitu era kekuasaan Dinasti Umayyah.

SIMPULAN

Kebijaksanaan Ali ra. sebagai Khalifah keempat dalam mengupayakan persatuan dan ukhuwah umat Islam dalam satu naungan panji Islam menemukan jalan yang rumit dan penuh resiko. Menyikapi penolakan bai'at dari minoritas umat Islam, Pembangkangan Thalhah dan Zubair dari bai'at, balas dendam akibat pencopotan jabatan pada Bani Umayyah yang terindikasi zalim dan korupsi, mengkambing hitamkan pembunuhan Utsman sebagai legitimasi pelengseran Khalifah Ali.ra. sampai

pada fitnah yang ditujukan kepada Ali sebagai dalang terbunuhnya Khalifah ketiga yang menjadi pemicu dua peristiwa Fitnah Kubro yaitu pecahnya Perang Jamal dan Perang Shiffin, sebisa mungkin Khalifah Ali ra. menghindari pertumpahan darah sesama saudara muslim dengan selalu terus mengedepankan pendekatan diplomasi dan musyawarah untuk mewujudkan kesatuan umat Islam.

REFERENSI

- A., Q., & Saleh, M. A. (2014). *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Tarikh al-Islami*, Terj. Zainal Arifin. Penerbit Zaman.
- Abdul Latif, A. M. (2011). *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, Terj. Abu Ziad Dhiaul-Haq dan Abdul Syukur Abdul Razak. Pustaka Azzam.
- Abdurrahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Logos Wacana Ilmu.
- al-Afghani, S. (2001). *Pemimpin Wanita di Kancan Politik Studi Sejarah Pemerintahan Aisyah*. Pustaka Pelajar.
- al-Husaini, al-H. (1989). *Imamul Muhtadin Sayyidina Ali bin Abi Thalib*. Yayasan al-Hamidi.
- al-Husaini, H. M. H. al-Hamid. (1986). *Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib Ra*. Lembaga Penyelidikan Islam.
- Al-Husaini, A.-H. (1985). *Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib*. Toha Putra.
- Amin, S. M. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*. Amzah.
- Armstrong, K. (2002). *Islam: Sejarah Singkat, diterjemahkan oleh Funky Kusnaendy Timur dari Islam: A Short History*. Penerbit Jendela.
- Ash-Shallabi, A. M. (2012). *Biografi Ali bin Abi Thalib*. Pustaka Al-kautsar.
- Audah, A. (2013). *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husein*. Pustaka Litera Antarnusa.

SAJARATUN: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
e-ISSN: 2809-8293 | <https://doi.org/10.37478/sajaratun.v9i2>
Dahlan, A. A. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*
(Cetakan 1). Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah*. Kencana Prenada
Media Group.

Fu'ad, A. Z. (2012). *Sejarah Peradaban Islam*
(*Paradigma Teks, Reflektif, dan Filosofis*). CV.
Indo Pramaha.

Hadi, S. (1990). *Metodologi Riset*. Andi Offset.

Hosen, N. (2018). *Islam Yes Khalifah No* (Jilid 1).
UIN Sunan Kalijaga Press.

Ibnu Katsir. (2014). *Perjalanan Hidup Empat*
Khalifah Rasul Yang Agung, Terj. Abu Ihsan
Al-Atsari. Darul Haq.

Ibrahim, Q. A., & Saleh, M. A. (2014). *Buku Pintar*
Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban
Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini,
diterjemahkan oleh Zainal Arifin dari al-
Mausu'ah al-Muyassarah fi alTarikh al-
Islami. Zaman.

Katsir, I. (2004). *Al-Bidayah Wan Nihayah*. Terj. Abu
Ihsan al-Atsari. Darul Haq.

Kuntowijoyo, K. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*.
Bentang Budaya.

Muhammad, A. J. (2011). *Tarikh Ath-Thabari Jilid 5*.
Terj. Abu Ziad Muhammad Dhiaul-Haq dan
Abdul Syukur Abdul Razak. Pustaka Azzam.

Shaban, M. A. (1984). *Sejarah Islam, Penafsiran Baru*
600-750, terj. Machnun Husein (Cetakan 1).
Rajawali Press.

Sholeh, S. (2009). *Politik Dalam Sejarah Islam*.
Dakwah Digital Press.

Supriyadi, D. (2008). *Sejarah Peradaban Islam*. CV.
Pustaka Setia.

Yatim, B. (1994). *Sejarah Peradaban Islam*. PT. Raja
Grafindo Persada.